

HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK KAJIAN POLEMIS DALAM CENDEKIAWAN ISLAM

Ishomuddin

Jurusan Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Sulfat Agung Blok VI/17Purwantoro Blimbing Malang
Telpon: 0341-496576, Hp: 08123586396
e-mail:

ABSTRACT

None of the teachings of Islam that brings disrepute and distress to humans. The Islamic Shari'ah guarantee the basic needs of human life known as al-khams daruriyyah. The Islamic Sharia also memperhatikan full problem is referred to as hajiyat, as Islam attention to important issues of human perfection in carrying out the so-called luxuries of life.

For the purposes and objectives of sharia, God has instituted various regulations as Wasilah or ways to achieve these explanations. Wasilah Without it, maqasid al-shari'ah should not be achieved. Therefore the discussion about Wasilah or manner is an important aspect in the assessment maqasid al-shari'ah.

PENDAHULUAN

Berbincangan lama yang kini menghangat kembali adalah *discourse* mengenai apakah ada hubungan antara Islam dan politik. Perbincangan ini menjadi sangat penting karena dikaitkan dengan maraknya diskusi-diskusi mengenai bentuk demokrasi—sebuah tipologi bentuk system pemerintahan yang dipakai oleh negara-negara Barat—di negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Pro dan kontra mengenai penerapan demokrasi di Indonesia menjadi agenda penting oleh beberapa organisasi sosial keagamaan maupun organisasi politik yang berbasis Islam.

Demokrasi merupakan salah satu konsep atau system politik. Politik memiliki pengertian dan ruang lingkup tergantung pada sudut pandang dan aspek yang dilihat. Dalam tataran praktis disebut "*low politics*" yakni politik praktis atau kepartain, dan "*high politics*" segala bentuk sumbangan pemikiran yang dimaksudkan untuk memasukkan misi dalam bentuk konsep atau apa saja yang diberikan kepada pemerintah bertujuan agar pemerintah menjadikan bahan tersebut sebagai acuan atau pedoman guna mengambil atau menentukan sebuah kebijakan.

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan politik. *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam

bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa (1) Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain system ketatanegaraan atau politik; oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada system ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru system ketatanegaraan Barat, (2) Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah system yang telah dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad dan oleh empat al-Khulafaur Rasyidin.

Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur; dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.

Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat system ketatanegaraan. Tetapi

aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat system ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Untuk mengkaji lebih jauh maka dilakukan penelitian mengenai hubungan antara Islam dan politik yang sampai sekarang masih menjadi polemik panjang baik itu yang terjadi di kalangan cendekiawan Islam itu sendiri maupun pandangan para orientalis terhadap Islam. Atas dasar itu maka penting dilakukan kajian mengenai hubungan Islam dan politik. Kajian ini ditekankan pada dua hal, antara lain (1) konsep politik dalam Islam dan, kedua, mengungkap macam-macam pandangan mengenai hubungan Islam dan politik dan para tokoh-tokohnya.

Dalam pelaksanaannya penelitian ini, karena bahan-bahan pokok atau data-data pokok yang dipakai adalah pemikiran-pemikiran atau wacana-wacana tertulis maka penelitian ini adalah penelitian *library research*. Dalam prakteknya peneliti melakukan penelusuran sumber-sumber pustaka berupa buku-buku, jurnal-jurnal, monograf, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan focus penelitian ini. Setelah itu dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari *research question* dari penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian dari beberapa sumber yang berkaitan dengan pokok permasalahan maka dapat diringkaskan sebagai berikut:

Para cendekiawan atau ulama tidak berbeda pendapat bahwa seluruh peraturan yang terdapat dalam Islam mempunyai tujuan dan keterangan yang penting yaitu untuk menjaga kepentingan manusia di dunia dan di akhirat. Peraturan itu dalam Islam termasuk juga apa yang disebut dengan politik Islam atau siasah syar'iyah. Dari situ mereka menyimpulkan maksud *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat Islam) sebagai tujuan utama dan rahasia agung yang terkandung di dalam syariah Islamiyyah. Oleh karena itu tidak ada satu pun ajaran Islam yang membawa keburukan dan kesusahan kepada manusia. Syari'ah Islamiyyah menjamin keperluan pokok dalam hidup manusia yang disebut sebagai *daruriyyah al-khams*. Syariah Islamiyyah juga memperhtikan secara penuh masalah yang disebut sebagai *hajiyat*, sebagaimana Islam memperhatikan masalah penting kesempurnaan

manusia dalam menjalankan kehidupan yang disebut sebagai *tahsiniyyat*.

Untuk kepentingan dan tujuan syariah, Allah telah menetapkan berbagai peraturan sebagai wasilah atau cara untuk mencapai penjelasan tersebut. Tanpa wasilah itu, maqasid al-syari'ah tidak boleh dicapai. Sebab itu pembahasan tentang wasilah atau cara merupakan satu aspek penting dalam pengkajian maqasid al-syari'ah. Para ulama membagi maqasid menjadi 3 (tiga) peringkat:

1. *Maqasid Daruriyyat*; yaitu suatu dasar atau keperluan yang wajib ada untuk menjamin tercapainya hajad hidup di dunia dan di akhirat. Ia merupakan keperluan pokok. Tanpa asas tersebut akan menyebabkan musnahnya kehidupan. Maqasid ini dijelaskan oleh Imam al-Syatibi seperti berikut:
 - a. Kepentingan agama. Untuk menegakkan agama, Allah mensyari'atkan berbagai prinsip (usul) pengabdian diri kepada Allah dan sebagainya. Manakala untuk menjamin pemeliharaan dan penjagaan agama, maka Allah mensyariatkan jihad, hukuman kepada orang murtad dan lain-lain.
 - b. Kepentingan Nyawa. Untuk mendapat zuriat yang sempurna, Allah mensyari'atkan sistem perkawinan dan peraturan-peraturan yang berkait. Manakala untuk menjamin keselamatan nyawa manusia, Allah mensyari'atkan pengharaman jenayah bunuh, memperkuat undang-undang qisas dan sebagainya.
 - c. Kepentingan akal. Untuk membangunkan akal manusia, Allah memeintahkan kesehatan dan penyuburan akal dengan mengisi kerohanian. Untuk melindungi akal, Allah mengharamkan arak dan apa saja yang memabukkan, termasuk melaksanakan secara ketat undang-undang yang berkaitan dengan itu.
 - d. Kepentingan keturunan. Untuk melahirkan keturunan yang baik, Allah mensyariatkan kaidah-kaidah tertentu dalam perkawinan seperti mengutamakan cirri keagamaan

dalam memilih pasangan dan lain-lain. Untuk menjaga keselamatan dan kesucian keturunan, maka Allah mengharamkan jenayah zina dan perkara yang berkaitan dengannya seperti pergaulan bebas dan sebagainya.

e. Kepentingan harta. Untuk mendapatkan harta dengan cara yang benar, Allah mensyariatkan kaidah-kaidah pemilikan harta seperti jual beli, persewaan dan sebagainya. Untuk melindungi keselamatan harta, Allah mengharamkan jenayah mencuri dan menunjuk dan memberlakukan undang-undang hudud dan lain-lain.

2. *Maqasid Hajiyyat*; yaitu suatu keperluan yang membawa ke-mudahan hidup seperti pengizinan (secara khas) untuk menjalankan beberapa sistem akad kehartaan dan muamalat yang mendesak, contoh jula saham, kebenaran khas melakukan ibadat dalam keadaan yang sulit seperti rukhsah shalat jamak dan qasar dan lain-lain. Peringkat maqasid yang kedua ini dijamin oleh Islam untuk tujuan menghindarkan kesusahan dan mempermudah sesuatu serta menyediakan ruang kesenangan kepada manusia. Sekiranya maqasid ini tidak wujud atau diabaikan, ia tidak memusnahkan sistem hidup, manum begitu sulit, dan kemungkinan akan timbulnya masalah-masalah akan dihadapi.
3. *Maqasid Tahsiniyyat*: yaitu suatu keperluan yang tidak pokok dan tidak mendesak, tetapi memberikan nilai kesempurnaan dalam hidup, seperti amalan sunat, adab-adab yang dianjurkan oleh Islam dalam kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Maqasid ini dijamin oleh Islam karena Islam sangat mementingkan tahap kesempurnaan dan kecermelangan atau keluasan untuk manusia. Manusia dibenarkan memenuhi kehendak naluri dan perasaan secara tabi'i tanpa melanggar syarak, seperti hiburan yang baik dan bermanfaat. Mereka boleh berusaha untuk mencapai tahap kemuliaan dan kedudukan yang tinggi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang menyeleweng.

Namun begitu pemakaian dan pelaksanaan kepada ketiga tahap maqasid ini tunduk pada kaidah keutamaan (awlawiyyat), yaitu perkara daruriyyat hendaklah didahulukan di atas hajiyyat dan tahsiniyya. Begitu juga apabila berlaku pertentangan antara mana-mana kepentingan itu, maka keutamaan diberikan kepada daruriyyat, kemudian hajiyyat dan akhirnya tahsiniyyat. Kaidah susunan keutamaan ini adalah penting untuk menghindarkan tindakan yang menentang dan menggalkan syariah Islamiyyah. Oleh karena kegiatan *siasah syar'iyah* merupakan suatu yang amat sensitif, maka setiap pelaksanaan siasah hendaklah dilakukan secara tepat dengan kehendak *maqasid syariah* yang disebutkan di atas. Padawaktu yang sama ia hendaklah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam berikut ini:

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Karim Zaydan (1987), *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Abd. Karim Ali dan Mohammad Zaidi Abdul Rahman dalam "Hukum Islam Semasa: Analisis Terhadap Pendekatan Golongan Modernis", *Prosiding Seminar Kebangsaan Fiqh Semasa 2003*. Kuala Lumpur: Jabatan Sayriah, Fakulti Pengajian Islam UKM.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar (1986), *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Kaherah: Dar al-Rayyan li al-Turath, juz 13.
- Al-Bukhariy, Muhammad Ibn Ismail (cetakan bersama Fath al Bari) Kaherah: Dar al-Rayyan, Juz 6.
- Al-Bujairimi, Sulaiman Ibn Omar Ibn Muhammad (1956), *Hasyiyah al-Bujairimi ala al-Manhaj al-Musammah al-Tajrid linaf'i al-Ibad ala Syarh Minhaj al-Tullab*, Kaherah:Matba'ah Mustafa al-Babi wa auladiah, Juz 2.
- Al-Buti (1992), *Dawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

- Al-Buti, Said Ramadhan (1991), *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah*, Beirut; Dar al-Fikr al Mu'asir.
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam (1985), *Sadd al-Dhara'i fi al-Syariah al Islamiyyah*, Beirut: Matba'ah al-Raihaniy.
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam (1985), *Sadd al-Dhara'i fi al-Syariah al Islamiyyah*, Beirut: Matba'ah al-Raihaniy.
- Al-Duraini, Fathi Ahmad (1987), *Khasa'is al-Tasyri' al-Islamiy fi al-Siasah wa al-Hukm*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Fasi, Allal (1963), *Maqasid al-Syar'iyah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Rabat.
- Al-Fayyumi, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali (tt), *al-Misbah al-Munir*, Beirut: Maktabah, Lubnah.
- Al-Ghazali (1988), *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali (1997), Abi Hamid bin Muhammad, *Al-Mustafa Min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Araby.
- Abu Id, Arif Khalil (1996), *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Urdun: Dar al-Nafa'is
- Al-Jawhari, Ismail bin Hammad (1404H/1984M), *Taj al-Lughah wa al-Arabiyyah*, juz 3. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayn.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibn Habib, (t.t.), *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mubarak, Muhammad (1989), *Nizam al-Islam, al-Hukm wa al-Dawlah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mun'im, Mahmud Abd. Rahman Abd (1984), *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*. J.3. Qahirah: Dar al-Fadlilah.
- Al-Naisaburi, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah al-Hakim (1990), *al-Mustadrak*, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 4.
- Al-Nasafiy, Najamuddin Ibn Hafs (1311 H), *Tilbah al-Talabah fi al-Istilahat al-Fiqhiyyah*, Bagdad: Maktabah al-Mathanna.
- Al-Nawawiy, Abu Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf (1994), *Syarh Sahih Muslim* (cetakan bersama Sahih Muslim), Beirut Dar-al Kutub al-Ilmiyyah, Juz 12 (jilid 4).
- Al-Qardhawi, Yusuf (1998), *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Daw' Nusus al-Syariah wa al-Maqasidiha*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- Al-Qurasyiy, Abd al-Ghalib Abd al-Kafi (1983), *Awwaliyyah al-Faruq al-Siasiyyah*, Riyad: Maktabah al-Haramain.
- Al-Qayyim, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr, Ibn (1995), *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Rais, Diya al-Din (1977), *al-Kharaj wa al-Nuzum al-Maliyyah*, Kaherah: Maktabah Dar al-Turath.
- Al-Razi, Muhammad Ibn Abi Bakr (1992), *Mukhtar al-Sihhah*, Beirut: Maktabah Lubnan.
- Al-Razi, Al-Imam Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir (1995), *Mukhtar al-Sihah*. Beirut: Maktabah Lubnan Nashirun.
- Al-Syatibiy (t.t.) *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tarablusi, Abu al-Hasan Ali Ibn Khalil (t.t.), *Mu'in al-Hukkam fima Yataraddad baina al-Khasmain min al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa, (t.t.), *al-Jami' al-Sahih*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats, juz 4.
- Al-Utwah, Abd. (1993), *al-Madkhal. ila al-Siasah al-Syar'iyah*, Riyad.

- Al-Zalbani, Rizq (t.t.) *Mudhakkirah fi al-Siasah al-Syar'iyah*, Jami'ah al-Azhar: Mathba'ah al-Syarq.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad (1988), *al-Istislah wa masalih al-Mursalat wa Usul Fuqaha*, Dimasq: Dar al-Qalam.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad (1998), *Al-Madkhal al-Fiqhy al-Am*, J.1. Damshiq: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhayly, Wahbah (1986), *Usul al-Fiqh al-Islamy*, J.1, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir.
- Abu Dawud (t.t.), *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr juz 4.
- Barakat, Nizam Mahmud (1985), *Muqaddimah fi al-Fikr al-Siasiy*, Riyad: al-Alamal-Kutub.
- Awdah, Abd al-Qadir (t.t.) *al-Islam wa Auda'una al-Siasiyah*, Beirut; Muassasah al-Risalah.
- Azizah Abu Bakar et.al. (1999), *Kamus Inggris Melayu Dewan*, c.2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hans , Wehr (1974), *A Dictionary of Modern Written Arabic*. c.3 Beirut: Librairie Du Liban.
- Harun, Abd al-Salam et al. (1963) *Mu'jam al-Wasit*: Dar al-Turath al-Islami.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin (1996), *Hasyiyah Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 4.
- Ibn Asyur, Muhammad al-Tahir (t.t.), *Maqasid al-Syar'iyah al-Islamiyyah*, Tunis: Al-Syarikat al-Tunisiyyah.
- Ibnu Farhun, Ibrahim Syamsuddin (1301 H), *Tasirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiah wa al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz
- Ibn Fudi, Syaikh Abdullah Ibn Muhammad (1988), *Diya' al-Siyasat wa Fatawa al-Nawazil*, Kaherah: al-Zahra' al-I'lam al-Arabiy.
- Ibn Hanbal, Ahmad (1991), *al-Musnad*. Beirut: Dar al-Fikr Juz 3.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman (t.t.), *al-Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadl Muhammad bin Mukram (1999), *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, juz 6.
- Ibn Nujaim, Ibn Nujaim Zainuddin (tt), *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, Juz 5.
- Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah (1995), *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Taimiyyah, Taqiuddin Ibn Ahmad (1988), *al-Siasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Ibnu Ya'qub , Al-Fairuz Abadi, Majd al-Din Muhammad (1987), *Al-Qamus al-Muhit*. Yusof Muhammad al-Baqa'iy. Thq, Dar al-Fikr: Beirut.
- Izzal-Din Abdul Salam (t.t.), *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar Ma'rifat, juz 1.
- Khallaf, Abd al-Wahab (1987), *al-Siasah al-Syar'iyah wa Nizam al-Islamiyyah fi al-Syuun al-Dusturiyyah, wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Khallaf, Abd al-Wahhab (1980), *al-Sultat al-Thalath fi al-Islam*. Kaherah: Dar al-Afaq al-Ghad.
- Khallaf, Abd al-Wahhab (1988), *As-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Syuun al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyah*. Kuwait : Dar al-Qalam.
- Muslim (t.t.), *Shahih Muslim* (cetakan bersama syarah Nawawiy), Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 12.
- Pulungan, J. Suyuthi (1994), *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Shukeri Mohamed (1999) "Siasah Syar'iyah dan Kedudukannya sebagai Metode Penentuan

Hukum” dalam *Hukum Islam Semasa bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun*, editor, Dr. Abd Karim Ali dan Raihanah Azahari. Kuala Lumpur: APIUM.

Taj, Abd. Rahman (1415 H), *al-Siasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islamiy*, Kaherah.

Yasin, Muhammad Na’im Catatan *Siasah Syar’iyyah* untuk pelajar (mahasiswa) Ph.D. Syari’ah, Universiti Jordan sesi Pnegajian 1992/1993.

Yusuf, Abu (t.t.), *al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma’rifah